
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN SUMEDANG: LITERATURE REVIEW (2019–2025)

Adji Aidil*¹, Aridla Wahab², Muhamad Azriel Syariq³, Raishard Fadil Hidayat⁴, Edi Setiawan⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Sebelas April

Article Info

Received Jul 2, 2025
Revised Nov 10, 2025
Accepted Nov 30, 2025

Keywords:

*Disaster
Mitigation
Participation*

ABSTRACT

This study aims to systematically review the literature on community participation in flood and landslide disaster mitigation efforts in Sumedang Regency between 2019 and 2025. Using the Systematic Literature Review (SLR) method, six scientific articles were analyzed to explore the forms, effectiveness, and challenges of community involvement in disaster risk reduction. The findings reveal that community participation predominantly occurs during the implementation phase, while participation in decision-making, evaluation, and utilization of outcomes remains limited. Contributing factors include limited disaster literacy, inadequate infrastructure, and insufficient institutional support. Although national regulations such as Law No. 24 of 2007 and Government Regulation No. 21 of 2008 emphasize community engagement in disaster management, practical application at the local level still encounters significant challenges. Strengthening institutional capacity, increasing disaster education, and promoting inclusive collaboration across sectors are essential to fostering meaningful and sustainable community participation.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

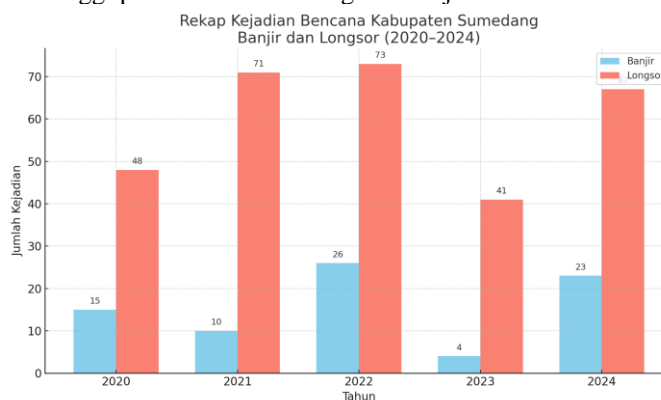
Corresponding Author:

Adji Aidil
Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April
Jl. Angkrek Situ No 19 Kelurahan Situ No 19 - Sumedang.
Email: adjiaidil123@gmail.com

1. INTRODUCTION

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana alam yang tinggi di dunia. Letak geografis, topografi yang kompleks, serta kondisi iklim tropis menyebabkan wilayah ini sangat rentan terhadap berbagai bencana hidrometeorologis, seperti banjir dan tanah longsor. Salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi adalah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini secara geografis memiliki kontur wilayah yang berbukit dan lereng curam, dengan curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun. Kombinasi antara kondisi geologis dan hidrologis tersebut menjadikan Sumedang sebagai daerah yang sangat berisiko terhadap bencana banjir dan longsor, terutama saat musim hujan tiba.

Data rekapitulasi kejadian bencana selama lima tahun terakhir di Kabupaten Sumedang memperlihatkan tingginya intensitas bencana banjir dan longsor. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tercatat bahwa kejadian banjir menunjukkan fluktuasi dengan puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 26 kejadian, dan kembali meningkat menjadi 23 kejadian pada tahun 2024 setelah menurun drastis di tahun 2023. Sementara itu, kejadian longsor tercatat konsisten tinggi, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2022 yaitu 73 kejadian, dan masih relatif tinggi pada tahun 2024 dengan 67 kejadian.



Gambar 2. Grafik Kejadian Banjir & Longsor
Sumber : Data Diolah Peneliti (BPBD Sumedang, 2025)

Pola kejadian tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya struktural telah dilakukan oleh pemerintah daerah, keterlibatan aktif masyarakat dalam siklus manajemen bencana masih menjadi tantangan utama. Rendahnya literasi kebencanaan, kurangnya pelatihan simulasi, serta minimnya forum komunikasi antarwarga dalam menghadapi bencana menjadi faktor penyebab belum optimalnya peran masyarakat.

Dalam konteks pengurangan risiko bencana (PRB), partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar penting yang harus diperkuat. PRB bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek sekaligus pelaku utama di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana meliputi berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari pengamatan terhadap tanda-tanda alam, penyampaian informasi potensi bencana kepada pihak berwenang, pelaksanaan evakuasi mandiri, hingga keterlibatan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan berbasis risiko.

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana di Kabupaten Sumedang masih tergolong rendah dan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya literasi kebencanaan, kurangnya pelatihan simulasi tanggap darurat, tidak adanya forum komunikasi kebencanaan berbasis komunitas, serta masih minimnya dukungan dari pemerintah dalam memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok siaga bencana (KSB) yang berkelanjutan. Padahal, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah menekankan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan manajemen risiko bencana.

Kajian partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana sangat penting dilakukan, terutama dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana peran serta masyarakat telah dikaji dan diimplementasikan dalam konteks lokal Sumedang. Dengan menelaah berbagai literatur akademik dari tahun 2019 hingga 2025, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan peta partisipasi masyarakat secara komprehensif, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang masih dihadapi, serta merekomendasikan strategi penguatan peran masyarakat dalam sistem mitigasi bencana daerah.

Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi secara sistematis berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sumedang, serta mengkaitkannya dengan kebijakan nasional dan praktik-praktik lokal yang berkembang. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model mitigasi bencana yang partisipatif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

2. METHOD

Penelitian ini mengadopsi metode Systematic Literature Review (SLR) dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi, menelaah, serta mengevaluasi berbagai penelitian yang relevan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perumusan pertanyaan penelitian, pencarian literatur, penetapan kriteria inklusi dan eksklusi, seleksi literatur, penyajian serta pengolahan data, hingga penarikan simpulan. Untuk penelitian yang melibatkan alat dan bahan, perlu dijelaskan secara rinci mengenai spesifikasi teknis dan jenis bahan yang digunakan.

Sementara itu, pada pendekatan kualitatif, penting untuk menguraikan peran kehadiran peneliti, karakteristik subjek dan informan, metode pengumpulan data, serta menggambarkan keandalan dan kualitas data yang diperoleh. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Sumedang” serta dibatasi pada publikasi antara tahun 2019 hingga 2025. Kriteria inklusi mencakup penelitian yang membahas partisipasi masyarakat dalam konteks mitigasi bencana banjir dan longsor serta telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Seluruh literatur yang ditemukan diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kemudian dianalisis lebih lanjut. Setelah tahap seleksi, artikel yang memenuhi kriteria dimasukkan ke dalam tabel untuk memudahkan analisis. Selanjutnya, peneliti melakukan kajian mendalam terhadap artikel-artikel tersebut, terutama pada bagian hasil penelitian. Pada bagian akhir, peneliti membandingkan temuan dari masing-masing studi untuk kemudian menarik kesimpulan secara komprehensif.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Berikut ini peneliti sajikan rekapitulasi hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sumedang.

Tabel 1. Hasil Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Sumedang

Penelitian dan Tahun	Jurnal	Hasil
Dadan Setia Nugraha, Alan Setiawan, Destrya Prematuri Agningsih, Dwi Nurul Aprilianti, Endas Sutisna, Lutfi Yuliani. (2020)	Journal of Regional Public Administration (JRPA),	Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang sudah dapat dikatakan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya sempurna. Sumberdaya yang dimiliki masih kurang memadai, diantaranya kurangnya pegawai, anggaran yang belum cukup memadai, begitupun dengan kurangnya fasilitas (sarana dan prasarana), yang belum terpenuhi secara maksimal.
.Ivan Darmawan, Khirunnisa Della , Putri Avelia,Muhammad Dhiyaul Haq (2020)	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat	Kondisi Desa Cintamulya sendiri sebenarnya sudah berkembang, akan tetapi masih banyak masalah yang harus dilakukan oleh warga yang ada di Desa Cintamulya sendiri. Permasalahan yang pertama yang ada di Desa Cintamulya sendiri tentang mitigasi bencana banjir adalah belum adanya edukasi mengenai pengelolaan sampah, serta TPS dan TPA di Desa Cintamulya itu sendiri. dikarenakan belum pernah adanya edukasi mengenai mitigasi bencana, maka masyarakat Desa Cintamulya masih sangat kurang pengetahuan akan hal ini, dengan adanya

		program ini, diharapkan masyarakat Desa Cintamulya kemudian bisa lebih paham mengenai segala faktor, resiko, dan hal-hal yang menyebabkan potensi bencana, serta edukasi tentang mitigasi bencana itu sendiri
Septian Dwi Pangestu, Muhammad Fedryansyah (2023)	Jurnal Pekerjaan Sosial	bahwa implementasi mitigasi bencana alam melalui KSB di Desa Cihanjuang telah berjalan dengan cukup optimal dalam aspek perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui proses lokal, SDM lokal, kebudayaan lokal, pengetahuan lokal, dan keterampilan lokal. Sedangkan aspek monitoring dan evaluasi program belum diimplementasikan secara optimal dalam kegiatan mitigasi bencana alam berbasis masyarakat melalui KSB di Desa Cihanjuang
Femil Umeidini, Eva Nuriah, Muhammad Fedryansyah (2019)	Jurnal Pekerja Sosial	Menunjukkan bahwa adanya bentuk partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan bencana di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor, bentuk partisipasi masyarakat tersebut berupa partisipasi pemikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi barang dan partisipasi uang. Kelima bentuk partisipasi tersebut sudah diterapkan dan berjalan dengan baik di dalam masyarakat ketika bencana banjir akan datang.
Ida Yunari Ristiani (2020)	Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik	Adanya partisipasi Masyarakat dalam bentuk partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda keterampilan dan kemahiran, serta partisipasi sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi paling menonjol yang dilakukan masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah partisipasi tenaga dan partisipasi sosial.
Ratnia Solihah (2020)	jurnal Kumawula Vol. 3 No. 1	artispasi masyarakat melalui FGD sangat penting dalam perencanaan mitigasi bencana. Permasalahan mitigasi di Kutamandiri mencakup: kurangnya informasi kebencanaan, rendahnya kesadaran warga, belum tersedianya infrastruktur mitigasi, serta pemanfaatan lahan yang rawan bencana. Solusi yang diusulkan meliputi edukasi mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur seperti sumur resapan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam penanganan bencana secara berkelanjutan dan lintas sektor.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mitigasi bencana, termasuk dalam konteks bencana banjir dan longsor yang kerap terjadi di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan telaah sistematis terhadap enam artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020 hingga 2025, ditemukan bahwa bentuk, kualitas, serta efektivitas partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana di wilayah ini menunjukkan keberagaman, dengan capaian yang relatif positif namun belum maksimal

Studi yang dilakukan oleh Dadan Setia Nugraha dan rekan-rekannya pada tahun 2020, yang diterbitkan dalam *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, menyoroti implementasi kebijakan mitigasi bencana

di tubuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menemukan bahwa secara administratif, kebijakan telah dijalankan dengan cukup baik. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi keterbatasan dari sisi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Ketiadaan pegawai yang memadai serta kurangnya fasilitas teknis dan logistik membuat upaya pelibatan masyarakat dalam mitigasi menjadi kurang optimal. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat yang diharapkan turut menjadi subjek aktif dalam mitigasi, justru terhambat karena kurangnya dukungan kelembagaan.

Di sisi lain, penelitian oleh Ivan Darmawan dan rekan-rekannya yang dilakukan di Desa Cintamulya pada tahun 2020 menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada rendahnya pengetahuan masyarakat terkait mitigasi bencana, khususnya banjir. Tidak adanya edukasi yang memadai, ditambah belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), membuat masyarakat belum memahami secara utuh tentang penyebab dan dampak dari bencana banjir. Penelitian ini menekankan bahwa edukasi mengenai mitigasi perlu menjadi prioritas dalam membangun kesadaran kolektif terhadap risiko bencana.

Kontras dengan situasi di Cintamulya, studi yang dilakukan oleh Septian Dwi Pangestu dan Muhammad Fedryansyah pada tahun 2023 mencatat keberhasilan implementasi mitigasi bencana berbasis masyarakat melalui pendekatan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di Desa Cihanjuang. Dalam studi ini, masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan mitigasi yang berbasis kearifan lokal, termasuk memanfaatkan sumber daya manusia, budaya, dan keterampilan lokal. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa aspek monitoring dan evaluasi program masih belum berjalan secara optimal. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun partisipasi pada tahap awal telah dilaksanakan dengan baik, namun siklus kebijakan belum sepenuhnya ditutup dengan sistem evaluasi partisipatif yang berkelanjutan.

Penelitian oleh Femil Umeidini dan rekan-rekan pada tahun 2019 juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam bentuk konkret. Di Desa Mekargalih, partisipasi muncul dalam beragam bentuk: mulai dari pemikiran, tenaga, keterampilan, barang hingga dana. Seluruh bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek, melainkan turut menjadi aktor penting dalam upaya penanggulangan bencana. Hal serupa juga diperkuat oleh penelitian Ida Yunari Ristiani pada tahun 2020, yang menekankan bahwa partisipasi tenaga dan sosial merupakan bentuk kontribusi masyarakat yang paling dominan dalam menghadapi bencana di lingkungannya.

Pendekatan partisipatif yang lebih terstruktur dan terencana tampak pada studi yang dilakukan oleh Ratnia Solihah pada tahun 2020 dalam Program Citarum Harum di Desa Kutamandiri, Kecamatan Tanjungsari. Dalam penelitian ini, masyarakat dilibatkan melalui forum Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan merancang langkah konkret mitigasi bencana banjir dan longsor. Meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata dan menyeluruh di semua wilayah, penelitian ini menjadi contoh praktik baik (*best practice*) pelibatan aktif masyarakat dalam mitigasi bencana berbasis desa.

Dalam konteks teoritik, semua temuan penelitian di atas dapat dianalisis lebih dalam menggunakan teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff, yang membagi bentuk partisipasi masyarakat ke dalam empat kategori, yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Dari seluruh literatur yang ditinjau, terlihat bahwa bentuk partisipasi yang paling dominan adalah partisipasi dalam pelaksanaan. Masyarakat banyak dilibatkan dalam kerja fisik, kegiatan sosial, maupun dalam bentuk donasi barang dan tenaga. Namun, partisipasi dalam pengambilan keputusan, seperti perencanaan kebijakan atau program mitigasi, masih belum menyeluruh. Hanya pada studi Ratnia Solihah dan studi KSB oleh Pangestu dan Fedryansyah yang menunjukkan indikasi kuat terhadap partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan. Sementara itu, dimensi partisipasi dalam evaluasi program masih belum mendapatkan perhatian yang cukup, padahal keberlanjutan program mitigasi sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam mengevaluasi dan merevisi strategi berdasarkan pengalaman di lapangan.

Dalam tinjauan hukum dan kebijakan, partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana telah mendapat legitimasi kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara eksplisit menyebutkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh siklus penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pascabencana. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi. Selain itu, Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, serta Permen Desa PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa, secara nyata memberi ruang bagi desa untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, termasuk pemberdayaan masyarakat dan pembentukan KSB.

Namun demikian, dari temuan yang telah dibahas, terlihat adanya kesenjangan antara norma yang tertuang dalam kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen untuk membangun kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta memastikan adanya

ruang partisipasi yang inklusif, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga dalam proses perencanaan, evaluasi, dan pelatihan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Sumedang dalam konteks mitigasi bencana banjir dan longsor telah menunjukkan keberadaan dan kemajuan yang berarti. Namun, kualitas partisipasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya bersifat reaktif dan temporer, tetapi menjadi proaktif, strategis, dan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah daerah, fasilitasi edukasi kebencanaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa menjadi prasyarat penting untuk mendorong partisipasi yang utuh dan berdampak nyata. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta merupakan jalan strategis untuk menciptakan sistem mitigasi yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap dinamika bencana di masa mendatang.

4. CONCLUSION

Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sumedang sudah berjalan, namun masih belum optimal. Masyarakat umumnya terlibat dalam pelaksanaan, tetapi belum banyak dilibatkan dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya edukasi, keterbatasan sumber daya, serta minimnya dukungan sarana dan prasarana. Padahal, regulasi seperti UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008 telah mendorong partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas, edukasi kebencanaan, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

ACKNOWLEDGEMENTS

Dalam artikel ini, peneliti menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan kontribusinya selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak penerbit jurnal yang telah menjadi referensi dalam penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas artikel di masa yang akan datang.

REFERENCES

- Nugraha, D. S., Setiawan, A., Agningsih, D. P., Aprilianti, D. N., Sutisna, E., & Yuliani, L (2020). Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*.
- Darmawan, I., Della, K., Avelia, P., & Haq, M. D. (2020). Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Mitigasi Bencana di Desa Cintamulya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Pangestu, S. D., & Fedryansyah, M. (2023). Implementasi Mitigasi Bencana Berbasis KSB di Desa Cihanjuang. *Jurnal Pekerjaan Sosial*.
- Femil, U., Nuriah, E., & Fedryansyah, M. (2019). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana di Desa Mekargalih. *Jurnal Pekerja Sosial*.
- Ristiani, I. Y. (2020). Peran Partisipasi Sosial dalam Mitigasi Bencana. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*.
- Solihah, R (2020). Perencanaan Partisipatif dalam Program Citarum Harum di Desa Kutamandiri, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kumawula*, Vol. 3 No. 1.
- Indriani, C. (2020). Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja (Skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Marcela, R., & Usiono. (2023). Persepsi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir: Systematic Literature Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 4996–5002
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Daerah.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.